

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga konsumen melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Gianyar selama Triwulan III tahun 2025 (Juli-September), menunjukkan adanya fluktuasi harga yang relatif dinamis. Secara umum, pada bulan Juli IPH menunjukkan tren kenaikan moderat dengan rata-rata berada di kisaran 1,0-1,5 persen. Kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh komoditas bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan beras. Peningkatan ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan di pasar lokal akibat faktor cuaca dan distribusi yang belum optimal.

Memasuki bulan Agustus, IPH mengalami penurunan dengan angka negatif hingga -2,22 persen. Penurunan ini utamanya disumbang oleh menurunnya harga cabai rawit, beras, dan daging ayam ras yang sempat tinggi pada bulan sebelumnya. Stabilitas pasokan dan penurunan permintaan pasca perayaan hari besar keagamaan turut mendorong penurunan harga di pasar konsumen.

Pada bulan September 2025, IPH kembali menunjukkan pergerakan yang cenderung stabil dengan kecenderungan peningkatan harga pada komoditas hortikultura seperti tomat, cabai merah, dan canang sari menjelang musim rahinan. Secara keseluruhan, fluktuasi harga selama Triwulan III tahun 2025 masih dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan tekanan inflasi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa faktor utama yang menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Gianyar selama Triwulan III tahun 2025 antara lain:

1. Terbatasnya pasokan komoditas hortikultura akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.
2. Distribusi antar daerah yang belum optimal sehingga menyebabkan keterlambatan suplai.
3. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah untuk beberapa bahan pokok seperti beras dan bawang putih.
4. Meningkatnya permintaan pada periode rahinan dan upacara keagamaan yang mendorong kenaikan harga temporer.
5. Keterbatasan akses permodalan bagi petani untuk menjaga kesinambungan produksi pangan strategis.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, TPID Kabupaten Gianyar bersama perangkat daerah terkait telah melaksanakan berbagai langkah strategis selama Triwulan III tahun 2025, antara lain:

1. Melakukan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di beberapa kecamatan untuk menjaga keterjangkauan harga.
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian dalam pemantauan harga dan stok.

Melakukan monitoring harian terhadap harga kebutuhan pokok dan komoditas penting di pasar tradisional melalui aplikasi SIGAPURA.

4. Menjaga kelancaran distribusi bahan pokok melalui pengawasan transportasi logistik oleh Dinas Perhubungan.
5. Mendorong optimalisasi lahan pekarangan rumah tangga melalui program PUSPA AMAN untuk ketahanan pangan lokal

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Gianyar selama Triwulan III tahun 2025 berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan efektivitas kebijakan, antara lain:

1. Masih perlunya peningkatan koordinasi antar kabupaten untuk menjamin pasokan antar wilayah.
2. Diperlukan pembinaan kepada petani dan pedagang dalam menjaga kontinuitas pasokan dan kestabilan harga.
3. Perlu peningkatan edukasi masyarakat terkait konsumsi produk lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa rekomendasi yang dapat diambil antara lain:

1. Memperkuat kerjasama antar daerah dalam penyediaan dan distribusi komoditas strategis.
2. Meningkatkan pelaksanaan pasar murah rutin dan operasi pasar untuk komoditas pangan bergejolak.
3. Mendorong akses pembiayaan kepada petani dan pelaku UMKM melalui program KUR dan KURDA.
4. Melakukan digitalisasi sistem pemantauan harga untuk mempercepat respons terhadap gejolak harga.
5. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam TPID melalui forum rutin dan pembagian peran yang lebih jelas.